



LAPORAN DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**DALAM RANGKA KEGIATAN BKSAP DAY
UNTUK PERSIAPAN KEKETUAAN INDONESIA DI
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)**

BOGOR, JAWA BARAT | 28 - 30 SEPTEMBER 2022



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- DASAR PENGIRIMAN DELEGASI
- DELEGASI
- MAKSUD DAN TUJUAN
- PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS
- ANGGARAN

ISI LAPORAN

- AGENDA RAPAT
- JALANNYA PERTEMUAN

LAIN-LAIN

KESIMPULAN DAN SARAN

- KESIMPULAN
- SARAN

PENUTUP

- UCAPAN TERIMA KASIH
- KETERANGAN LAMPIRAN
- KATA PENUTUP

L A P O R A N

DELEGASI BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA KEGIATAN BKSAP DAY UNTUK PERSIAPAN KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

Bogor - Jawa Barat, 28-30 September 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

DPR RI akan menerima estafet keketuaan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* pada Sidang Umum ke-43 AIPA yang akan diselenggarakan secara luring pada tanggal 20 – 25 November 2022 mendatang di Phnom Penh - Kamboja. Kepemimpinan Indonesia diharapkan dapat membawa misi penguatan ketahanan ASEAN di berbagai pilar seperti ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, sentralitas ASEAN juga menjadi fokus yang diharapkan dapat diperkuat selama keketuaan DPR di AIPA. Semangat untuk tetap menempatkan ASEAN sebagai pusat arsitektur kawasan dapat menjadi kekuatan baru yang menyatukan dan membawa perdamaian di wilayah Asia-Pasifik, dengan memperhatikan pergeseran perimbangan kekuatan yang begitu dinamis. Visi Indonesia sebagai Presiden AIPA 2023 dengan demikian adalah memperkuat konektivitas antar anggota AIPA yang bersinergi dengan misi keketuaan Indonesia di ASEAN berdasarkan pendekatan *people-to-people*.

Parlemen sebagai Lembaga representasi rakyat berperan menjembatani antara organisasi regional, termasuk AIPA - dengan aspirasi konstituennya. Membangun masyarakat yang tangguh untuk bangkit paska pandemi COVID-19 merupakan kerja bersama antara rakyat dengan para wakil di Parlemen. Oleh karenanya, misi strategis yang dibawa DPR RI untuk menjadi tema AIPA tahun 2023 adalah *Resilient Society* (Ketahanan ASEAN) dan *ASEAN Unity* (Kesatuan ASEAN). Agar misi ini dapat bersinergi dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) memerlukan saran dan masukan dari pihak Kementerian Luar Negeri (KEMLU) RI. Diharapkan, DPR dapat berperan mendukung pencapaian tujuan-tujuan di bawah pilar ASEAN.

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Kegiatan BKSAP Day terkait persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dilaksanakan pada tanggal 28-30 September 2022 berdasarkan pada :

1. Keputusan Pimpinan BKSAP dalam rapatnya tanggal 1 Maret 2022 perihal penggunaan anggaran untuk kegiatan persiapan keketuaan DPR RI di AIPA Periode 2022 - 2023
2. Surat Tugas nomor 47/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/09/2022 tanggal 23 September 2022 dalam rangka perjalanan dinas ke Bogor, Provinsi Jawa Barat.

C. DELEGASI

Delegasi DPR RI yang hadir pada kegiatan BKSAP Day ini sebagai berikut:



Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.SC.
FP-Gerindra /A-086
Ketua BKSAP/ Anggota Komisi I



Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M.
F-PDIP/A-139
Wakil Ketua BKSAP/ Anggota Komisi III



Putu Supadma Rudana, M.B.A.
F-PD/A-563
Wakil Ketua BKSAP/Anggota Komisi VI



Dr. H. Mardani, M.ENG.
F-PKS/A-422
Wakil Ketua BKSAP/Anggota Komisi II



Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
F-PAN/A-487
Wakil Ketua BKSAP/Anggota Komisi XI



Krisdayanti
F-PDIP/A-212
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi IX



Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si.
F-PDIP/A-252
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi IX



Ir. Hugua
F-PDIP/A-259
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi II



Drs. H. Darul Siska
F-PGolkar /A-271
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi IX



Ravindra Airlangga, M.S.
F-PGolkar /A-292
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi IV



Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si.
F-PGerindra /A-079
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi XI



Fadhlullah, S.E.
F-PGerindra /A-059
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi I



Ratih Megasari Singkaru, M.Sc
F-PNasdem /A-402
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi X



Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.
F-PKB/A-057
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi X



Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.
F-PD/A-546
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi XI



H. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A.
F-PKS/A-418
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi V



Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
F-PAN/A-492
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi VII



Rojih
F-PPP/A-466
Anggota BKSAP/ Anggota Komisi X

Selama rapat koordinasi berlangsung, Anggota Delegasi didampingi oleh Pejabat dan Staf Setjen DPR RI serta Tenaga Ahli BKSAP.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan BKSAP Day ini yaitu:

- 1) Mempersiapkan keketuaan Indonesia di AIPA tahun 2023 yang secara khusus untuk peran parlemen di forum AIPA, sebagai bagian dari keketuaan Indonesia di ASEAN
- 2) Bertukar pandangan, gagasan, dan ide terkait usulan tema sidang dan *key deliverables* yang dapat memperkuat daya tawar Indonesia selama menjabat keketuaan di AIPA

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan BKSAP Day ini untuk :

- 1) Mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri RI terkait persiapan DPR RI dalam menyambut Keketuaan AIPA
- 2) Memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI dalam mencapai kepentingan Indonesia melalui berbagai forum di kawasan regional, termasuk diplomasi parlemen melalui AIPA

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan Delegasi DPR RI menghadiri rapat koordinasi Persiapan Keketuaan Indonesia di AIPA, baik dalam hal teknis maupun substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun materi rapat dan bahan lainnya untuk delegasi terhadap topik yang dibahas.

F. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.328.846.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Kegiatan ini telah diagendakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Satuan Kerja Dewan tahun 2022 dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 002.02.CF. 5805.AEG.001.052.A.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA RAPAT

Secara garis besar, kegiatan BKSAP Day ini diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 28 - 30 September 2022 dengan agenda utama kegiatan bersama Kementerian Luar Negeri RI pada tanggal 29 September 2022 untuk mendiskusikan persiapan keketuaan Indonesia di AIPA.

Adapun program kegiatan BKSAP Day ini sebagai berikut:

Rabu, 28 September 2022

- Kedatangan delegasi
- Briefing Pimpinan BKSAP dengan Sekretariat Biro KSAP
- Temu Mahasiswa Magang Merdeka

Kamis, 29 September 2022

- Kegiatan sosialisasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait Keketuaan Indonesia di AIPA
- Diskusi tentang tema keketuaan Indonesia di AIPA dan *key deliverables* pada Sidang Umum ke-44 AIPA dan Sidang-Sidang AIPA lainnya

Jum'at, 30 September 2022

- *wrap-up discussion*
- Kepulangan delegasi

B. JALANNYA PERTEMUAN

Kegiatan utama BKSAP Day ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022, yaitu forum dialog antara BKSAP dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mendiskusikan persiapan keketuaan Indonesia di AIPA

1. Opening Session

Pertemuan dibuka dengan sambutan oleh Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon, M.Sc. (F-Gerindra) yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas kehadirannya. Selanjutnya disampaikan bahwa DPR RI akan menerima estafet jabatan Presiden AIPA dari Kamboja yang juga menandai dimulainya Keketuaan

Indonesia di AIPA pada tahun 2023. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia juga menerima jabatan Keketuaan di ASEAN (ASEAN Chair).

Dr Fadli Zon organisasi AIPA telah mengalami perkembangan signifikan. Mulai Sidang Umum ke-43 yang akan dilaksanakan di Kamboja nanti, AIPA akan memiliki 2 Badan tidak tetap yang baru dibentuk yaitu “*AIPA Young Parliamentarians*” dan “*AIPA – ASEAN Hearing*”. Sehingga jumlah dari keseluruhan Komisi dan Badan tidak tetap yang ada di AIPA akan bertambah menjadi 4 Komisi dan 5 Badan tidak tetap. Komisi meliputi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi, sementara Badan tidak tetap meliputi AIPACODD, AIPA Caucus, WAIPA, AIPA Young Parliamentarians dan AIPA – ASEAN Hearing. Disamping penambahan Badan tidak tetap, jumlah negara yang menjadi peninjau atau observer di AIPA juga akan bertambah menjadi tujuh belas negara dengan masuknya Amerika Serikat. Sehingga organisasi AIPA telah berkembang menjadi semakin kompleks sesuai dengan dinamika isu-isu global.

Selanjutnya Ketua BKSAP menjelaskan bahwa sebagai Presiden AIPA Tahun 2023, DPR-RI berkewajiban untuk menyelenggarakan 3 sidang utama, yaitu :

1. Sidang *Coordinating Committee of AIPA Women Parliamentarians (WAIPA)*, rencananya akan diselenggarakan di Bukittinggi – Sumatera Barat pada April 2023. Dalam hal ini, Ketua DPR RI akan bertindak, tidak saja sebagai Presiden AIPA namun juga sebagai Ketua WAIPA.
2. Sidang ke-6 *AIPA Advisory Council on Dangerous Drug (AIPACODD)*, rencananya akan diselenggarakan di Lido - Jawa Barat pada akhir Mei 2023. Sidang AIPACODD akan membahas isu-isu terkait pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kawasan. Selain dengan KEMLU RI, BKSAP juga akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
3. Sidang Umum ke-44 AIPA atau *AIPA General Assembly*, rencananya akan diselenggarakan pada akhir Agustus 2023 di Surabaya. *AIPA General Assembly* sebagai forum tertinggi akan menghasilkan keputusan AIPA dalam bentuk Resolusi dan Report yang implementasinya di masing-masing negara wajib dilaporkan di Sidang Umum berikutnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua BKSAP juga menyampaikan bahwa usulan tema Sidang Umum AIPA tahun 2023 adalah *Resilient Community, ASEAN Unity* dengan mempertimbangkan pentingnya ASEAN, paska pandemi COVID-19, untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama; dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan *people-*

centered. *Key deliverables* juga telah disusun berdasarkan tiga (3) pilar ASEAN yaitu bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial- Budaya.

Guna meningkatkan dukungan parlemen untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai, *key deliverables* yang diusulkan pada bidang POLITIK, adalah: Stabilitas Kawasan, South China Sea, Organisasi ASEAN, *Human Security*

Pada bidang EKONOMI, dengan tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan tangguh di kawasan ASEAN (*an inclusive and resilient ASEAN economy*), *key deliverables* yang diusulkan, yaitu: Ekonomi digital, UMKM dan Pariwisata

Sedangkan untuk meningkatkan dukungan parlemen dalam mewujudkan Masyarakat ASEAN yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan sosial budaya, termasuk pandemi, perubahan iklim dan tantangan lainnya, *key deliverables* yang diusulkan pada bidang SOSIAL-BUDAYA, yaitu: Identitas ASEAN, Pendidikan dan pelatihan vokasi, Peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan, dan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan

Sebagai penutup, Dr. Fadli Zon menyampaikan, melalui pertemuan ini agar Kementerian Luar Negeri RI dapat memberikan saran dan masukan terkait usulan tema sidang selama Presidensi AIPA, maupun *key deliverables* yang sekiranya perlu diperjuangkan oleh DPR RI dalam Sidang Umum AIPA melalui Draft Resolusi di masing-masing Komisi dan Badan.

2. Paparan Kementerian Luar Negeri RI

Acara dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh para Pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu :

- Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto R. Suryodipuro
- Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Rolliansyah Soemirat,
- Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Berlianto Pandapotan Hasudungan,

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Sidharto R. Suryodipuro**, menyampaikan presentasi dan paparan terkait persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Aspek keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan bertumpu pada tiga hal, yaitu : 1) tantangan eksternal berupa proyeksi situasi dunia dan Kawasan, 2) tantangan internal berupa situasi terkini di ASEAN, dan 3) prioritas

Indonesia dan koordinasi persiapan Sekretariat Nasional (SETNAS) ASEAN terkait keketuaan Indonesia di ASEAN.

Kondisi geopolitik dan geoekonomi global di kawasan ASEAN akan menjadi area pertimbangan utama bagi kekuatan dunia. Tantangan geopolitik dan geoekonomi global diproyeksikan akan semakin meruncing di tahun 2023. Sejumlah persoalan yang masih harus akan dihadapi antara lain dampak pandemi yang belum usai, ancaman *emerging diseases* yang masih membayangi, konflik Rusia-Ukraina dan potensi perluasan dampaknya ke arena lain (referendum Donbas dan sabotase pipa gas Nord Stream), stagflasi di Eropa, serta krisis pangan dan energi. Sedangkan di wilayah Asia Timur, eskalasi ketegangan serta potensi konflik Selat Taiwan akibat kompetisi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok terkait masalah Taiwan kian intens dan menjadi tantangan tersendiri, termasuk memanasnya situasi di Selat Korea. Dan di wilayah terdekat, Asia Tenggara, situasi konflik Laut Tiongkok Selatan juga belum membaik. Instabilitas kawasan berpotensi meningkat dengan adanya pembentukan aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom dan United States of America). Prospek ekonomi global juga diramalkan cenderung melemah di tahun 2023 dengan meningkatkan resesi global, munculnya stagflasi dan disrupsi rantai pasok yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan global.

Dalam lingkup internal ASEAN, tantangan terbesar saat ini adalah penyelesaian masalah Myanmar, di mana krisis kian mendalam dan komitmen *junta militer* terhadap pelaksanaan *5 Points of Consensus* sangat lemah. Selain itu, persoalan lain seperti masuknya pengungsi Rohingya dan kejahatan di sepanjang perbatasan Myanmar juga masih menjadi pekerjaan rumah di ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mengoptimalkan Keketuaan ASEAN untuk mendorong implementasi *5 Points of Consensus* dan terus memastikan agar isu Myanmar tidak menyandera proses pembangunan masyarakat ASEAN.

KEMLU RI juga memberikan *update* terkait persiapan Indonesia dalam SETNAS ASEAN di mana Kementerian Luar Negeri masih terus mengkoordinasikan beberapa prioritas yang menjadi *deliverables* di ASEAN 2023 dengan K/L, antara lain tentang visi ASEAN 2045, kerja sama maritim, ketahanan pangan, penguatan arsitektur dan penanganan pandemi di masa mendatang.

3. Sesi Diskusi

Sesi selanjutnya yaitu diskusi dengan agenda penyampaian pertanyaan atau masukan dari Pimpinan dan Anggota BKSAP yang kemudian dijawab

dan ditanggapi oleh KEMLU RI yang diwakili oleh Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R. Suryodipuro.

Pada sesi ini, Anggota BKSAP berpartisipasi aktif menyampaikan pertanyaan dan komentar terhadap paparan yang disampaikan oleh KEMLU RI, antara lain yaitu:

- **Krisdayanti (F-PDIP)** menyampaikan pertanyaan:



Anggota BKSAP Krisdayanti (F-PDIP/A-212) menyampaikan pertanyaan kepada Kemlu RI

- Langkah Konkrit apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah dalam menyesuaikan paradigma arsitektur kawasan ASEAN yang baru sehingga nantinya DPR RI sebagai lembaga legislatif bisa menyesuaikan dan membantu mendorong langkah tersebut?
 - Bagaimana transparansi anggaran Kementerian Luar Negeri mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN mengingat sejauh ini telah banyak mengadakan pertemuan dalam proses mempersiapkannya?
 - Langkah konkrit apa yang perlu dilaksanakan terkait pergeseran paradigma yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, dari *zero sum* menjadi *win-win solution*, dari *competition* menjadi *collaboration* dan dari *containment* menjadi *engagement*?
- **Ir. Hugua (F-PDIP)** menyampaikan pertanyaan :
 - Bagaimana pedoman arah politik ASEAN untuk di masa yang akan datang?
 - Bagaimana posisi serta relevansi ASEAN di tengah konflik Geopolitik Asia Pasifik?



Anggota BKSAP Hugua (F-PDIP/A-259) mempertanyakan relevansi ASEAN

- Apakah Politik Bebas Aktif oleh ASEAN tetap relevan di era konflik geopolitik Asia Pasifik?

- **Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si. (F-PDIP)** menyampaikan tanggapan dan pertanyaan:



Anggota BKSAP Adriana Charlotte Dondokambey (F-PDIP/A-252) menyampaikan pendapatnya terkait geopolitik Kawasan Asia Pasifik

- Akan ada perubahan geopolitik pada tahun mendatang yang peradabannya akan berpusat di kawasan Asia Pasifik, secara khusus di ASEAN
- Bagaimana tantangan yang timbul akibat pembentukan aliansi *Australia, United Kingdom and United States of America (AUKUS Alliance)*)
- Bagaimana ASEAN merespon berbagai kondisi tersebut sehingga parlemen dapat menentukan langkah untuk mendukung presidensi Indonesia di ASEAN?

- **Drs. H. Darul Siska (F-PG)** menyampaikan tanggapan dan masukan:
 - Perlunya meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kementerian Luar Negeri dirasa perlu untuk memperhatikan masalah dalam negeri yang berhubungan dengan negara-negara ASEAN lainnya, misalnya saja mengenai ketenagakerjaan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang masih banyak bermasalah. Hal ini dimaksudkan agar Keketuaan Indonesia di ASEAN bisa lebih bermakna dan bermanfaat bagi dalam negeri. Bagaimana keketuaan Indonesia di ASEAN bisa memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia? terutama pada isu pekerja migran yang melibatkan negara lain di ASEAN seperti Malaysia dan Kamboja



Anggota BKSAP Darul Siska (F-PG/A-271) mempertanyakan dampak dari Keketuaan Indonesia di ASEAN

- Isu tenaga kerja secara umum yang merupakan tantangan dan peluang tersendiri bagi ASEAN. Bagaimana pasar bebas ASEAN dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Indonesia?
 - Bagaimana progress kebangkitan ekonomi ASEAN pasca pandemi?
 - Potensi Indonesia untuk memperkenalkan produksi vaksin dalam negeri di ASEAN. Merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri untuk memperhatikan komoditas yang bernilai jual baru yaitu vaksin Covid-19 buatan Indonesia untuk dipromosikan di pasar ASEAN.
- **Ravindra Airlangga, M.S. (F-PG)** menyampaikan pertanyaan:
 - Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan forum ASEAN untuk membatasi pemanasan global pada ambang batas 1.5 derajat

celcius dan mendorong isu Krisis Iklim sebagai fokus selama masa keketuaan Indonesia di ASEAN? Bagaimana potensi ASEAN untuk merespon masalah perubahan iklim



Anggota BKSAP Ravindra Airlangga (F-PG/A-292) mengangkat isu perubahan iklim dalam diskusi

- Apakah perdagangan karbon dapat diwujudkan di ASEAN sebagai bentuk insentif pelestarian lingkungan? Bagaimana potensi ASEAN untuk melakukan *carbon trading*?
- **Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si. (FP-Gerindra)** menyampaikan pertanyaan:



Anggota BKSAP Kamrussamad (F.P-Gerindra/A-79) mempertanyakan terkait strategi politik Indonesia

- Paparan yang disampaikan belum komprehensif mengenai bagaimana peranan Indonesia di ASEAN dalam kali keempat Keketuaan Indonesia di ASEAN. Belum ada gambaran jelas mengenai perspektif Indonesia dalam memandang negara-negara anggota ASEAN dari perspektif kepentingan nasional, karena di

satu sisi Indonesia dipandang sebagai *debit market* atau pasar bagi produk-produk mereka.

- Bagaimana strategi politik Indonesia di kawasan ASEAN, apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi ekonomi ASEAN?

- **Fadhlullah, S.E. (FP-Gerindra)** menyampaikan pertanyaan :



Anggota BKSAP Fadhlullah (F.P-Gerindra/A-59) mengangkat isu Rohingya dan Papua

- Bagaimana sikap Indonesia dalam menangani isu Rohingya?
- Bagaimana perhatian Kementerian Luar Negeri terhadap isu dalam negeri seperti Isu Papua yang berpengaruh pada citra Indonesia di kancah global?

- **Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si. (F-PKB)** menyampaikan pendapat dan masukan:



Anggota BKSAP Andi Muawiyah Ramly (F-PKB/A-57) mempertanyakan kegunaan Sekretariat ASEAN di Jakarta

- Kurangnya peran Sekretariat ASEAN dalam mendiseminasikan berbagai kegiatan ASEAN Belum banyak publikasi dan penyebaran informasi mengenai kegunaan Sekretariat ASEAN di Indonesia sehingga dirasa masih kurang dalam mewedahi kepentingan negara yang ada di dalamnya, terlebih bagi Indonesia. Bagaimana sebenarnya fungsi Sekretariat ASEAN yang berada di Indonesia?
 - Untuk selanjutnya, seperti apa Indonesia ingin memproyeksikan peran Indonesia di ASEAN?
- **Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M. (F-PD)** menyampaikan pendapat dan masukan:



Anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD/A-546) mengharapkan ditingkatkannya peran Duta Besar Indonesia di Kawasan ASEAN

- Mengapresiasi peran DPR RI untuk mengambil peran dalam keketuaan ASEAN di tahun 2023. Peranan Indonesia dewasa ini sebagai anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara dirasa masih kurang.
- Mengharapkan peranan lebih dari Duta Besar Indonesia di Kawasan ASEAN mengingat peranan Duta Besar yang dirasa masih kurang dalam mewedahi aspirasi dan hak Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara lain.
- Indonesia perlu mengoptimalkan perdagangan dengan negara-negara selain negara besar, khususnya dengan sesama negara ASEAN.
- Potensi konflik yang perlu diawasi antara China dengan Taiwan. Bagaimana cara meningkatkan keamanan serta memperkokoh

kedaulatan Indonesia di ASEAN, terutama dalam sengketa wilayah Laut Natuna

- **H. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. (F-PKS)** menyampaikan pertanyaan : Apa target Indonesia dalam Keketuaan ASEAN untuk menguatkan *bargaining position* Indonesia di ASEAN?



Anggota BKSAP Syahrul Aidi Maazat (F-PKS/A-418) mempertanyakan target Indonesia dalam Keketuaan ASEAN

- **Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si. (F-PAN)** menyampaikan pertanyaan dan tanggapan :



Anggota BKSAP Dr. Asman Abnur (F-PAN/A-492) mengemukakan rumitnya proses imigrasi di Indonesia

- Polemik nama Laut Cina Selatan karena ambiguitasnya dirasa merugikan bagi Indonesia.

- Sistem imigrasi Indonesia yang masih terlalu rumit sehingga wisatawan cenderung memilih berwisata ke negara lain sehingga Kementerian Luar Negeri perlu memperhatikan hal ini.
- **Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD)** menyampaikan tanggapan dan masukan:



Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PD/A-563) berharap agar momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN dapat dimanfaatkan di bidang pertahanan dan keamanan

- Pertemuan ini adalah momentum yang baik untuk berdiskusi secara intensif dengan KEMLU RI untuk sinkronisasi berbagai prioritas diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI.
- Dengan sudah dilaksanakannya Presidensi Indonesia di ASEAN selama empat kali, hal ini menjadi peluang kepemimpinan Indonesia untuk tampil menjadi *leader* di tingkat regional, khususnya di kawasan ASEAN
- Diharapkan dengan peran ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi di bidang ekonomi, perdagangan, dan mempertahankan kedaulatan wilayah di tengah berbagai tantangan regional maupun global
- Mengenai masalah kedaulatan wilayah dan juga seni budaya bangsa Indonesia, bagaimana seni budaya asli Indonesia dapat diproteksi serta dilestarikan melalui diplomasi di ASEAN?
- Mengharapkan momentum Presidensi Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara
- **Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS)** menyampaikan masukan:
 - Pentingnya koordinasi yang intensif yang perlu dibangun antara Kementerian Luar Negeri RI dan DPR RI guna mempersiapkan

berbagai pertemuan yang melibatkan Indonesia, seperti G20 dan ASEAN

- Dalam rangka mengoptimalkan momentum Keketuaan Indonesia baik di AIPA maupun P20, diperlukan intensifikasi hubungan kerja sama antara BKSAP dengan Kemenlu.



Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS/A-422) menegaskan pentingnya koordinasi antara Kemlu dan DPR dalam mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan yang melibatkan Indonesia

- Berkenaan dengan fenomena bonus demografi Indonesia, adakah tindakan afirmatif dalam menerapkan kebijakan *Free Entry* (Bebas Tiga Bulan Visa Kunjungan) bagi para pemuda Indonesia di negara ASEAN?
- **Dr. Fadli Zon, M.Sc., (FP-Gerindra)** menyampaikan tanggapan dan pertanyaan:



Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F.P-Gerindra/A-86) mengingatkan potensi peluang dan tantangan system konsensus di ASEAN

- Sistem konsensus yang dimiliki ASEAN berpotensi menjadi peluang maupun tantangan, khususnya untuk mencapai kesepakatan terkait permasalahan yang dihadapi ASEAN.

- Berdasarkan pengalaman di forum AIPA, pembahasan terkait Rohingya selalu mengalami *deadlock* yang mengakibatkan tidak adanya pembahasan di Komite Politik selama rentang waktu beberapa tahun terakhir
 - Apakah Indonesia masuk dalam kategori *gainer* atau *looser* di dalam ASEAN, mengingat banyaknya *proxy* yang ada di dalam ASEAN.
 - Apakah ASEAN masih relevan untuk mewadahi kepentingan nasional Indonesia? Terutama dengan adanya beberapa negara anggota ASEAN yang saat ini menjadi *proxy* kubu kekuatan besar seperti China.
 - Bagaimana manfaat nyata yang sudah diberikan ASEAN kepada Indonesia?
 - Apakah reformasi ASEAN diperlukan dalam mendukung optimalisasi fungsi ASEAN?
- **Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN)** menyampaikan tanggapan dan pertanyaan :



Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir (F-PAN/A-487) bertanya mengenai Timor Leste

- Posisi Timor Leste di dalam ASEAN? Apakah akan masuk sebagai Anggota ASEAN?
- Bagaimana kemajuan Indonesia dalam kerja sama kawasan Indo-Pasifik?
- Merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri terkait perbankan, bahwa Indonesia dirasa perlu membuka cabang Bank milik negara di negara lain di kawasan Asia Tenggara.
- Indonesia perlu lebih meningkatkan kapasitasnya dalam menjalin kerja sama dengan negara lain di berbagai bidang, menimbang Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi hal tersebut di atas, pihak Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Sidharto R. Suryodipuro memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:



Direktur Jendral Kerja Sama ASEAN menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anggota BKSAP

- ASEAN dalam usianya yang sudah 55 tahun telah menunjukkan bahwa kawasan ASEAN yang tadinya adalah kawasan terpecah dan penuh konflik, saat ini sudah relatif damai. Hal ini menjadi nilai tambah ASEAN sebagai kawasan yang damai dan netral sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih maju. Tantangan untuk ASEAN adalah bagaimana ASEAN dapat merespon berbagai ancaman konflik yang cukup besar. sehingga, melalui keketuaan ASEAN, Indonesia berharap agar sentralitas ASEAN dapat dihormati;
- Di bidang ekonomi, ASEAN diharapkan untuk menjadi pusat dari *global value chain* yang kuat yang berdampak pada stabilitas politik.
- Masalah konsensus adalah salah satu tantangan yang dihadapi ASEAN. Ini salah satu prioritas Indonesia melalui pembahasan terkait *decision making mechanism* di dalam ASEAN sehingga harapannya dapat berdampak pada proses pembuat kebijakan secara internal di ASEAN. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa negara ASEAN memiliki kultur kepemimpinan tersendiri yang juga mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di ASEAN;
- Terkait Sekretariat ASEAN, dukungan dana utama adalah dari Indonesia, dengan harapan diplomasi kawasan dapat berpusat di Indonesia, secara khusus Jakarta menjadi ibukota diplomatik Kawasan;

- Terkait masalah pekerja migran, disampaikan bahwa perlindungan migran di masa krisis adalah salah satu prioritas utama Indonesia dalam Keketuaan ASEAN, khususnya di masa pandemi yang mengakibatkan tantangan tersendiri bagi pekerja migran. Tantangan lain adalah terkait *upskilling* bagi pekerja migran.
- Beberapa pertanyaan Anggota yang belum terjawab sekarang akan diberikan jawaban secara tertulis dan dikirimkan ke BKSAP



Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN beserta jajarannya

4. **Sesi Penutup**

Sebagai penutup dialog, Ketua BKSAP menginformasikan bahwa pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian atau *agreement* dengan AIPA (yang ketika itu masih bernama AIPO), mengenai hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) yang mengatur antara lain: lokasi kantor sekretariat AIPA, fasilitas serta kemudahan-kemudahan dari pemerintah Indonesia. Perjanjian ini berjudul “*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly on the Privileges and Immunities of the AIPA Secretariat in Jakarta*”, diratifikasi oleh Bapak Ali Alatas dan disahkan oleh Presiden Soeharto. Kemudian ratifikasinya diperbarui oleh Bapak Marty Natalegawa pada tahun 2011 karena adanya transformasi AIPO menjadi AIPA.



Seluruh peserta berfoto bersama setelah acara

Dalam perkembangannya, AIPA melakukan relokasi kantor dari DPR RI ke Gedung ASEAN. Relokasi ini disetujui sepenuhnya oleh para Anggota AIPA melalui Resolusi AIPA No. 41/GA/2020/org/07 mengenai *the Relocation of AIPA Secretariat Premises*, yang disetujui pada Sidang Umum ke 41 AIPA di Vietnam. Telah disepakati bahwa Sekretariat AIPA tidak lagi berkantor di DPR-RI dan telah merelokasi kantornya ke *ASEAN Building*. Sehingga sejak relokasi tersebut, segala fasilitas serta kemudahan-kemudahan untuk Sekretariat AIPA tidak lagi menjadi kewajiban Indonesia melalui DPR-RI.

Terkait dengan hal ini, DPR RI akan berkirin surat kepada KEMLU guna menyelesaikan masalah ini, kiranya perpindahan lokasi Sekretariat AIPA memerlukan perjanjian/*agreement* baru atau cukup dengan berdasarkan Resolusi AIPA saja.

III. LAIN-LAIN

Dalam kegiatan BKSAP Day ini juga digelar tatap muka dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Magang Merdeka di BKSAP. Dalam pertemuan tersebut para mahasiswa berdialog dengan para Anggota BKSAP terkait peran dan fungsi BKSAP, khususnya diplomasi parlemen di kawasan ASEAN. Sebagaimana ASEAN, dijelaskan bahwa AIPA juga merupakan soko guru diplomasi parlemen di kawasan regional. Bahkan ASEAN sebagai organisasi regional juga mewakili Kawasan dalam forum-forum internasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan BKSAP Day dalam rangka persiapan keketuaan Indonesia di AIPA tahun 2022 – 2023 telah berhasil dilaksanakan dan berjalan lancar
2. Keketuaan Indonesia di ASEAN (*ASEAN Chair*) bersamaan waktu dengan kepemimpinan DPR RI di AIPA (*AIPA Presidency*) pada tahun 2023.
3. Kehadiran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada BKSAP terkait tema utama Sidang Umum AIPA dan *key deliverables*
4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berpandangan bahwa usulan tema Sidang Umum AIPA dan *key deliverables* yang disiapkan oleh BKSAP telah selaras dengan aspek keketuaan Indonesia di ASEAN (*ASEAN Chair*) tahun 2023.
5. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam keketuaan di AIPA di tahun 2023 berasal dari wilayah regional maupun global, diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat antara Kementerian Luar Negeri dan DPR RI
6. BKSAP DPR RI perlu bersinergi dengan KEMLU RI agar keketuaan Indonesia di ASEAN (*ASEAN Chair*) dan kepemimpinan DPR RI di AIPA (*AIPA Presidency*) pada tahun 2023 dapat berhasil memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan

B. SARAN

1. Perlunya diadakan pertemuan secara intens antara BKSAP DPR RI dan Kementerian Luar Negeri, khususnya dengan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, untuk mempersiapkan Keketuaan Indonesia di AIPA (*AIPA Presidency*).
2. Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat memberikan jawaban secara tertulis dan formal untuk merespon pertanyaan-pertanyaan BKSAP yang belum terjawab selama dialog berlangsung.
3. BKSAP DPR RI perlu segera menyusun *Roadmap to AIPA Presidency 2023* sebagai rujukan bagi Sekretariat untuk menyiapkan langkah-langkah teknis keketuaan Indonesia di AIPA.

V. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI sehingga rapat koordinasi ini dapat berjalan lancar dan sukses. Delegasi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretariat dan semua pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Keketuaan Indonesia di AIPA.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran dokumen kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Program of Activities*
- 2) Skenario Ketua Rapat
- 3) Presentasi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN KEMLU RI
- 4) *AIPA Presidency Theme and Deliverables Draft*
- 5) Intervensi Pertanyaan Anggota BKSAP
- 6) Dokumentasi Foto

C. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Delegasi DPR RI dalam melaksanakan tugas kedewanan melalui kegiatan BKSAP Day dalam rangka persiapan keketuaan Indonesia di AIPA yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 September 2022 di Bogor – Jawa Barat.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 September 2022

a.n. Delegasi
Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon

A-086

DAFTAR LAMPIRAN

- *Program of Activities*
- *Skenario Ketua Rapat*
- *Presentasi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN*
KEMLU RI
- *AIPA Presidency Theme and Deliverables Draft*
- *Intervensi Pertanyaan Anggota BKSAP*
- *Dokumentasi Foto*

**PERTEMUAN BKSAP DPR RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DALAM RANGKA PERSIAPAN KEKETUAAN INDONESIA DI AIPA**

Bogor – Jawa Barat, 29 September 2022

PROGRAM OF ACTIVITIES

10.00 Registrasi

11.00 – 13.00 Makan Siang

Venue : LLOne Restaurant – Lantai 3

Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf

13.00 – 15.30 DISKUSI

Venue : North Ballroom – Lantai 3

Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf

- Pembukaan oleh Dr. Fadli Zon, SS, M.Si, Ketua BKSAP, selaku Ketua Rapat
- Masukan KEMENLU RI: Pembahasan tentang **tema** Keketuaan Indonesia di AIPA dan **key deliverables** pada Sidang Umum AIPA dan Sidang-Sidang AIPA lainnya
- Diskusi
- Penutup

**PERTEMUAN BKSAP DPR RI DENGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PERSIAPAN KEKETUAAN INDONESIA DI AIPA**

Bogor – Jawa Barat, 29 September 2022

SKENARIO KETUA RAPAT

Oleh Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Yang Terhormat Para Wakil Ketua BKSAP dan Anggota BKSAP;

Yang Terhormat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Bapak Sidharto R. Suryodipuro, beserta jajaran;

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Ibu Endah, beserta jajaran;

Hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Om Swastiastu

Namo Budaya

Salam sejahtera untuk kita semua

- Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dari Kementerian Luar Negeri yang telah berkenan hadir dalam rapat hari ini untuk membahas persiapan Keketuaan Indonesia di AIPA tahun 2023.
- Pada akhir Sidang Umum ke- 43 AIPA yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 – 25 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja, DPR RI akan menerima serah terima jabatan Presiden AIPA dari Kamboja yang menandai dimulainya Keketuaan Indonesia di AIPA Tahun 2023. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia juga menerima jabatan Keketuaan di ASEAN (ASEAN Chair).
- Sebagai tambahan, mulai Sidang Umum ke-43 nanti, AIPA juga akan memiliki 2 Badan tidak tetap yang baru dibentuk yaitu “**AIPA Young Parliamentarians**” dan “**AIPA – ASEAN Hearing**”. Selain itu, jumlah negara yang menjadi peninjau atau

observer di AIPA juga akan bertambah menjadi **tujuh belas** negara dengan masuknya **Amerika Serikat**.

Para hadirin yang saya hormati,

- Penting bagi BKSAP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar tercapai misi DPR RI selama Presidensi di AIPA yang bersamaan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN.
- Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia maka kegiatan sidang-sidang AIPA di tahun 2023 akan dilaksanakan secara luring, kehadiran fisik.
- Sebagai Presiden AIPA Tahun 2023, DPR-RI berkewajiban untuk menyelenggarakan 3 sidang utama, yaitu :
 1. **Sidang *Coordinating Committee of AIPA Women Parliamentarians (WAIPA)***, rencananya akan diselenggarakan di Bukittinggi – Sumatera Barat pada April 2023. Dalam hal ini, Ketua DPR RI akan bertindak, tidak saja sebagai Presiden AIPA namun juga sebagai Ketua WAIPA.
 2. **Sidang ke-6 *AIPA Advisory Council on Dangerous Drug (AIPACODD)***, rencananya akan diselenggarakan di Lido - Jawa Barat pada akhir Mei 2023. Sidang AIPACODD akan membahas isu-isu terkait pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kawasan. Selain dengan KEMLU RI, BKSAP juga akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 3. **Sidang Umum ke-44 AIPA atau *AIPA General Assembly***, rencananya akan diselenggarakan pada akhir Agustus 2023 di Surabaya.

AIPA General Assembly sebagai forum tertinggi akan menghasilkan keputusan AIPA dalam bentuk **Resolusi** dan **Report** yang implementasinya di masing-masing negara wajib dilaporkan di Sidang Umum berikutnya.
- Sebagai tambahan, Sidang ke-14 AIPA Caucus Tahun 2023 yang merupakan pertemuan untuk melaporkan implementasi Resolusi di masing-masing negara, akan diselenggarakan oleh Parlemen Vietnam.

- Selain itu, DPR RI juga akan turut hadir pada pertemuan *ASEAN - AIPA Interface Meeting* yang selama ini secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di sela-sela ASEAN Summit.

Para hadirin yang saya hormati,

- Melalui rapat ini, kami berharap KEMLU dapat memberikan saran atau masukan, baik terkait **usulan tema sidang** selama Presidensi AIPA, maupun **key deliverables** yang kiranya perlu diperjuangkan oleh DPR RI dalam Sidang Umum AIPA melalui Draft Resolusi di masing-masing Komisi dan Badan.
- Terkait tema utama Sidang Umum AIPA, kami semula mengusulkan tema yang berjudul ***Resilient Community, ASEAN Unity***. Tema tersebut tentunya diusulkan dengan mempertimbangkan pentingnya ASEAN, paska pandemi COVID-19, untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama; dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan *people-centered*.
- *Key deliverables* juga telah disusun berdasarkan tiga (3) pilar ASEAN yaitu bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial- Budaya.
 - Guna meningkatkan dukungan parlemen untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai, *key deliverables* yang diusulkan pada bidang **POLITIK**, adalah:
 - **Stabilitas Kawasan.**
 - **South China Sea**
 - **Organisasi ASEAN**
 - ***Human Security***
 - Pada bidang **EKONOMI**, dengan tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan tangguh di kawasan ASEAN (*an inclusive and resilient ASEAN economy*), *key deliverables* yang diusulkan, yaitu:
 - **Ekonomi digital**
 - **UMKM**
 - **Pariwisata**
 - Sedangkan untuk meningkatkan dukungan parlemen dalam mewujudkan Masyarakat ASEAN yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan sosial

budaya, termasuk pandemi, perubahan iklim dan tantangan lainnya, key deliverables yang diusulkan pada bidang **SOSIAL-BUDAYA**, yaitu:

- **Identitas ASEAN**
 - **Pendidikan dan pelatihan vokasi**
 - **Peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan**
 - **Pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan**
- Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait persiapan DPR RI dalam memegang presidensi AIPA yang akan datang. Selanjutnya kami persilahkan Bapak/Ibu dari Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan saran dan masukannya.

**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
menyampaikan masukannya

**

Terima kasih Bapak/Ibu sekalian atas masukannya

- Selanjutnya saya persilahkan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota BKSAP untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaan atau melengkapi informasi agar persiapan keketuaan Indonesia menjadi Presiden AIPA menjadi semakin matang.

**

DISKUSI

**

- Bapak/Ibu sekalian, lengkap sudah sesi diskusi kita hari ini. Pertemuan ini telah menghasilkan saran dan rekomendasi berharga untuk DPR RI, yang tentunya kami telah catat dan akan tindaklanjuti.
- Sebelum menutup pertemuan ini, ada satu hal lagi yang ingin kami tanyakan kepada Bapak/Ibu dari Kementerian Luar Negeri.
- Pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian atau *agreement* dengan AIPA (yang ketika itu masih bernama AIPO), mengenai hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) yang mengatur antara lain: **lokasi kantor**

sekretariat AIPA, fasilitas serta kemudahan-kemudahan dari pemerintah Indonesia. Perjanjian ini berjudul “*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly on the Privileges and Immunities of the AIPA Secretariat in Jakarta*”, diratifikasi oleh Bapak Ali Alatas dan disahkan oleh Presiden Soeharto. Kemudian ratifikasinya diperbarui oleh Bapak Marty Natalegawa pada tahun 2011 karena adanya transformasi AIPO menjadi AIPA.

- Dalam perkembangannya, AIPA melakukan relokasi kantor dari DPR RI ke Gedung ASEAN. Relokasi ini disetujui sepenuhnya oleh para Anggota AIPA melalui Resolusi AIPA No. 41/GA/2020/org/07 mengenai *the Relocation of AIPA Secretariat Premises*, yang disetujui pada Sidang Umum ke 41 AIPA di Vietnam. Telah disepakati bahwa Sekretariat AIPA tidak lagi berkantor di DPR-RI dan telah merelokasi kantornya ke *ASEAN Building*. Sehingga sejak relokasi tersebut, segala fasilitas serta kemudahan-kemudahan untuk Sekretariat AIPA tidak lagi menjadi kewajiban Indonesia melalui DPR-RI. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah kita memerlukan perjanjian/*agreement* baru yang mengatur mengenai perubahan ini? ataukah dengan berdasarkan Resolusi saja sudah cukup?

**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
menyampaikan masukannya

**

Terima kasih atas masukannya.

Sebagai penutup, saya selaku Ketua BKSAP, sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Dirjen beserta jajaran dan Anggota BKSAP pada rapat ini. Semoga kolaborasi antara BKSAP DPR RI dengan KEMLU RI untuk mempersiapkan keketuaan Indonesia di ASEAN, termasuk Presidensi AIPA, dapat terus berjalan dengan baik dan lebih bersinergi.

Sekian. Terima kasih.

Wa’alaikumussalam wr. Wb.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om



**RAPAT KOORDINASI
PERSIAPAN KEKETUAAN ASEAN 2023
29 SEPTEMBER 2022**

SIDHARTO R. SURYODIPIURO
**DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA ASEAN –
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

ASPEK KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN 2023

1

PROYEKSI SITUASI DUNIA DAN KAWASAN

TANTANGAN EKSTERNAL

2

SITUASI TERKINI ASEAN

TANTANGAN INTERNAL

3

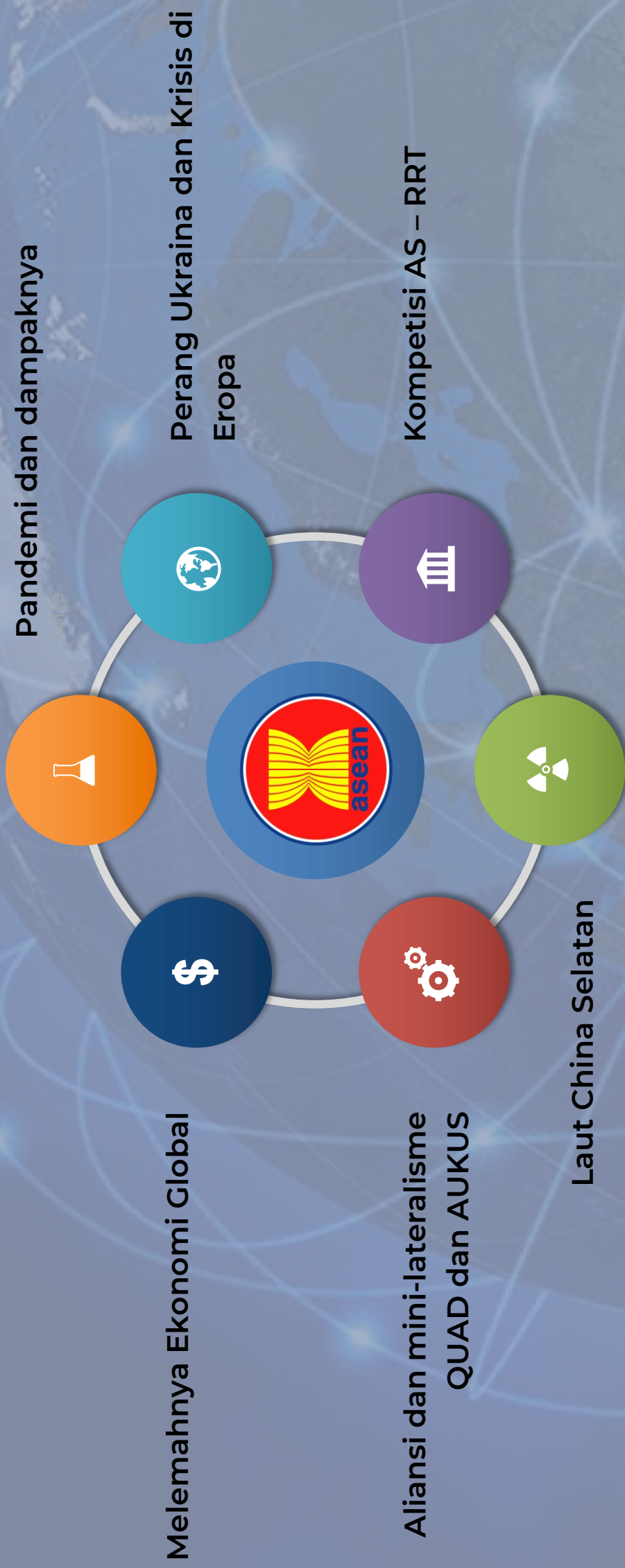
KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN 2023

PRIORITAS INDONESIA DAN KOORDINASI PERSIAPAN SETNAS



Gambaran Dunia & Kawasan

Tantangan Eksternal





Situasi Internal ASEAN

Tantangan Internal



- ASEAN Leaders' Summit, April 2021
- Membantu Myanmar kembali ke jalur demokrasi

5PC

Setelah
1,5 tahun

- Tidak ada kemajuan signifikan
- Junta tetap menciptakan situasi tidak kondusif

- Special AMM akhir Oktober
- Pertemuan khusus KTT di sela-sela KTT ke-40 dan 41

Asesmen KTT ASEAN
& Way Forward



HARAPAN KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN

Resilient Community, ASEAN Unity

Dewasa ini, berbagai kalangan berasumsi bahwa ASEAN telah menjadi magnet dan arena persaingan bagi para kekuatan global seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Dari perspektif politik dan keamanan, ASEAN dihadapkan pada berbagai persoalan yang akan semakin pelik kedepan, seperti pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan ASEAN dan Cina, serta ASEAN dengan negara mitra lainnya. Serta kemungkinan timbulnya perlombaan senjata yang dipicu oleh modernisasi militer yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menanggapi peningkatan kemampuan militer oleh negara-negara besar di luar kawasan, yang memiliki kepentingan di kawasan. Di sisi lain, secara ekonomi ASEAN dituntut untuk memiliki daya tahan yang lebih baik, melalui peningkatan perdagangan intra-kawasan, pengembangan UMKM, digitalisasi dan ekonomi hijau. Pada saat yang sama, kredibilitas ASEAN dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal kawasan mulai dari demokrasi, penanganan hak asasi manusia, stabilitas kawasan, kesejahteraan sosial, serta ketahanan masyarakat masih dipandang secara skeptis.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN merupakan momen yang selalu menjadi harapan banyak pihak. Kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa misi penguatan ketahanan ASEAN di berbagai pilar seperti sosial, ekonomi, dan politik. Di samping itu, keketuaan Indonesia juga diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat sentralitas ASEAN sebagai kekuatan baru yang menyatukan dan membawa perdamaian di wilayah Asia Pasifik. Untuk mencapai misi itu, dibutuhkan ASEAN yang bersatu dan solid yang mana konektivitas antar negara termasuk *people-to-people* menjadi salah satu kunci. Indonesia juga diharapkan dapat menggalang kesepahaman yang lebih baik diantara negara-negara ASEAN dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan, sebagai sebuah syarat untuk ASEAN yang lebih sejahtera.

Parlemen sebagai perwakilan suara rakyat berfungsi untuk menjembatani antara organisasi regional dengan aspirasi rakyat. Parlemen bekerja bersama rakyat untuk membangun masyarakat yang tangguh, terutama setelah mengalami pandemi COVID-19. Dengan demikian, ketahanan masyarakat (*Resilient Society*) dan Kesatuan ASEAN (*ASEAN Unity*) merupakan dua misi strategis yang akan dibawa parlemen untuk menjadi tema AIPA tahun 2023, dan diharapkan dapat bersinergi dengan tema keketuaan Indonesia di ASEAN.

Untuk mencapai visi dan misi seperti dijabarkan di atas, dibutuhkan dukungan peran parlemen untuk pencapaian tujuan-tujuan di bawah pilar ASEAN.

I. POLITIK

Tujuan yang ingin dicapai di bidang politik adalah meningkatkan dukungan parlemen untuk menciptakan kawasan ASEAN yang damai dan stabil.

Key deliverables:

- **Stabilitas Kawasan.**

ASEAN yang lebih stabil, aman dan damai ditengah pergeseran *balance of power* di Asia Pacific serta kecenderungan *Arms Race* Intra-kawasan yang dipicu oleh peningkatan kapabilitas militer negara-negara besar diluar kawasan yang memiliki kepentingan terhadap kawasan.

- **South China Sea**

Implementasi segera dari *Codes of Conduct* di *South China Sea* serta penyelesaian permasalahan teritorial melalui mekanisme damai.

- **Organisasi ASEAN**

ASEAN yang secara organisasi lebih responsif dalam menjawab tantangan regional dan global

- **Human Security**

- ∞ Meminimalisir *irregular movement of displaced persons* sebagai dampak dari adanya konflik internal di salah satu negara di kawasan.
- ∞ Peningkatan kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam bentuk kerja sama *sharing intelligence* dan *enforcement* terhadap potensi resiko *transnational crime*.

II. EKONOMI

Tujuan yang ingin dicapai di bidang ekonomi adalah meningkatkan dukungan parlemen untuk ekonomi ASEAN yang inklusif dan tangguh (*An inclusive and resilient ASEAN economy*).

Key deliverables:

- **Ekonomi digital**

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, ekonomi digital terus menjadi mesin pertumbuhan yang kuat selama pandemi dan trennya diperkirakan akan terus berlanjut pasca pandemi. Integrasi digital ASEAN diproyeksikan berpotensi menghasilkan peningkatan US\$1 Triliun dalam PDB regional pada tahun 2025, oleh karena itu, percepatan integrasi digital sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk kelangsungan hidup pascapandemi tetapi juga untuk membangun ASEAN Economic Community yang kuat dan tangguh ditandai oleh efisiensi, produktivitas

tinggi, dan konektivitas *value-chain* yang lebih baik. Diharapkan pengembangan ekonomi digital dapat berkontribusi juga bagi peningkatan perdagangan intra-ASEAN.

- **UMKM**

UMKM masih merupakan salah satu fondasi utama ekonomi ASEAN. Pengembangan sektor UMKM dapat dikaitkan dengan pengembangan sektor digital. Pemerintah dan Parlemen perlu bekerja sama untuk memenuhi dua prioritas utama. Pertama, teknologi digital untuk memberikan kesempatan yang setara dan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi, terutama bagi UMKM. Kedua, teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

- **Pariwisata**

Meningkatkan dukungan peran parlemen untuk pencapaian visi pariwisata ASEAN 2025 yang bertujuan menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas, berkomitmen pada pembangunan pariwisata yang seimbang untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat ASEAN pasca COVID-19.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, resolusi-resolusi SIUM AIPA terdahulu mengamanatkan untuk melembagakan kesiapsiagaan nasional dan mekanisme tanggapan terhadap COVID-19 dan pandemi di masa depan, seperti: (1) amandemen undang-undang ketenagakerjaan untuk beradaptasi dengan pengaturan kerja alternatif; (2) pemutakhiran regulasi untuk mengoptimalkan ekonomi digital; (3) menjunjung tinggi hak pemuda atas pendidikan untuk mempersiapkan mereka menghadapi ancaman dan peluang di masa depan; dan (4) pembangunan infrastruktur sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan UMKM.

III. SOSIAL BUDAYA

Tujuan yang ingin dicapai di bidang sosial budaya adalah meningkatkan dukungan parlemen untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan sosial budaya, termasuk di dalamnya pandemi, bencana alam, perubahan iklim dan tantangan lainnya.

Key deliverables:

- **Identitas ASEAN**

Mempromosikan dan mendorong terwujudnya identitas dan kesadaran ASEAN secara penuh yang akan diukur melalui ASEAN Awareness, ASEAN Relevance, dan ASEAN Appreciation. Ketiga nilai atau parameter ini merupakan tahapan masyarakat ASEAN dalam menginternalisasi identitas ASEAN, yang dimulai dari kesadaran akan keberadaan ASEAN, mengetahui manfaat ASEAN, hingga mengapresiasi keberadaan ASEAN untuk kehidupan masyarakat secara umum.

- **Pendidikan dan pelatihan vokasi**

Mendorong terwujudnya masyarakat ASEAN yang tangguh dan terampil dalam menghadapi tantangan perubahan zaman sehingga mampu bersaing dengan baik. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat ASEAN dapat berkontribusi pada menurunnya kemiskinan, dan terserapnya tenaga kerja sesuai bidang yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki.

- **Peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan**

Meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dan pemuda dalam berbagai forum di ASEAN, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan terkait pembangunan. Sejauh ini, ASEAN telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pemuda ASEAN maupun upaya gender mainstreaming. Dengan pelibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan, diharapkan dapat mewakili suara perempuan dan pemuda di ASEAN dan merespon berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengedepankan perspektif perempuan dan pemuda di dalamnya.

- **Pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan**

Meningkatkan peran anggota parlemen dalam membangun *political will* untuk akselerasi pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta aksi iklim termasuk penetapan kebijakan harga karbon. Hal ini untuk memastikan pemenuhan komitmen nasional dan kontribusi pencapaian target-target di bawah Paris Agreement dan SDGs. Selaras dengan Nusa Dua Declaration sebagai hasil Sidang Ke-144 IPU bulan Maret 2022, kerangka legislasi dan kebijakan nasional tentang perubahan iklim harus mencakup target yang jelas dan terikat waktu untuk memfasilitasi pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, pandemi COVID-19 dan masa pemulihan pasca pandemi memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara untuk mulai melakukan perubahan mendasar pada sistem energi yang tidak berkelanjutan saat ini, melakukan transisi energi dan mencapai target Net Zero.

**INTERVENSI/PERTANYAAN PADA RAKOR BKSAP – KEMLU
MENGENAI KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN
SERTA KEKETUAAN DPR-RI DI AIPA**

BIDANG POLITIK & KEAMANAN

Stabilitas dan Keamanan Kawasan

1. Stabilitas dan keamanan Asia Tenggara sangat penting. Karena merupakan pra-syarat utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang tentunya menjadi tujuan semua negara di anggota ASEAN. Namun demikian, tidak bisa kita pungkiri pula bahwa hari ini dinamika yang berkembang di Kawasan Asia Tenggara memiliki resiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas Kawasan. Misalnya, dampak konflik kepentingan wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang tidak hanya melibatkan negara-negara klaim, tetapi juga mengundang reaksi dari negara-negara besar di sekitar Asia Tenggara yang memiliki kepentingan strategis di Kawasan. Kecenderungan yang terjadi salah satunya adalah seringnya kita mendengar laporan mengenai pelanggaran batas wilayah oleh kapal militer asing di wilayah kita, gelar kekuatan militer yang saling bersambut di Laut Tiongkok Selatan, serta peningkatan kekuatan militer negara-negara besar yang berkepentingan di Asia Tenggara, sebagai salah satu strategi peningkatan daya tangkal (*deterrence*) terhadap negara berkepentingan lainnya yang dianggap sebagai ancaman. Contohnya, Australia yang baru-baru ini membeli kapal selam nuklir. Kita pahami Bersama bahwa pembelian kapal selam nuklir melalui kesepakatan AUKUS bersama AS dan Inggris tersebut, adalah dalam rangka mengimbangi kekuatan militer Tiongkok. Dalam konteks pentingnya keamanan dan stabilitas Kawasan, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi terwujudnya stabilitas tersebut. Pertanyaan saya, sejauh mana dinamika ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2023 mendatang? Lalu bagaimana Indonesia melalui ASEAN bisa berperan?

2. Terkait dengan Myanmar, sebagaimana kita ketahui Bersama, hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan di internal negara tersebut. Berita-berita terbaru di media justru melaporkan bertambahnya korban jiwa masyarakat sipil akibat serangan junta militer. Situasi juga diperparah dengan adanya tokoh-tokoh oposisi terhadap junta yang di eksekusi. Di sisi lain, perkembangan proses repatriasi pengungsi Rohingya juga seperti jalan di tempat. Keketuan Indonesia di ASEAN dan DPR-RI di AIPA nanti, saya kira merupakan momentum yang tepat untuk mendorong solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Oleh sebab itu, perlu kiranya ada keselarasan antara Pemerintah dan DPR-RI dalam diplomasi di Kawasan, untuk mencari solusi bagi persoalan Myanmar. DPR-RI sendiri, melalui BKSAP, selama ini konsisten dan tegas mengenai isu Myanmar di AIPA. Hingga saat ini Parlemen Myanmar yang dibentuk oleh Junta tidak diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan AIPA karena memang mereka bukan merupakan Parlemen yang resmi dipilih oleh rakyatnya. Tahun depan, tentunya ini akan menjadi momen kita bersama, pemerintah dan DPR-RI untuk membuat terobosan baru sebagai ASEAN Big Brother dan sebagai pimpinan ASEAN dan juga AIPA, terkait isu Myanmar. Bagaimana kira-kira proyeksi kebijakan pemerintah melalui Kemlu terkait Myanmar untuk tahun 2023 nanti?

Isu Laut Tiongkok Selatan

3. Salah satu kendala yang paling serius bagi integrasi ASEAN adalah persoalan sengketa wilayah yang belum terselesaikan antara negara-negara anggota. Persoalan sengketa wilayah antar negara anggota ini saya kira dapat kita jadikan salah satu *deliverable* pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA nanti. Bahwa penyelesaiannya harus melalui mekanisme damai dan saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing sehingga tidak mengganggu stabilitas kawasan. Kemudian disamping sengketa wilayah antara negara-negara anggota ASEAN, ada juga persoalan wilayah yang irisannya dengan ASEAN sangat kuat dan berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara besar, yaitu isu Laut Tiongkok Selatan. Menurut kami yang diperlukan terkait isu tersebut

adalah implementasi segera dari Codes of Conduct. Mohon dapat dijelaskan sejauh mana perkembangan implementasi dari Codes of Conduct tersebut saat ini? Sebab menurut saya, Indonesia melalui keketuaan di ASEAN dan AIPA nanti dapat mendorong implementasi segera dari Codes of Conduct.

Organisasi yang lebih responsif terhadap tantangan regional dan global

4. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi, baik di ASEAN ataupun di AIPA selama ini berdasarkan pada konsensus sesuai dengan yang tertuang pada ASEAN Charter. Selama ini memang tidak pernah ditemukan masalah dengan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tersebut. Namun demikian, Ketika organisasi dituntut untuk merespon tantangan regional maupun global yang bersifat mendadak dan juga mendesak, sebagaimana pada isu pengungsi Rohingya dan Kudeta Myanmar, dibutuhkan organisasi yang responsif sehingga dapat segera menemukan solusi. Berdasarkan pengalaman kami di AIPA, selama 4 tahun berurut-turut perjuangan kami untuk menghasilkan *outcome document* terkait isu pengungsi Rohingya selalu menemui jalan buntu karena tidak tercapainya konsensus. Padahal isu pengungsi Rohingya dan isu kudeta Myanmar yang baru-baru terjadi ini memiliki potensi *spill over effect* yang cukup besar di Kawasan, sehingga membutuhkan perhatian segera semua negara-negara anggota ASEAN. Demikian halnya dengan isu kudeta Myanmar yang hingga hari ini negara-negara anggota ASEAN mengalami kesulitan dalam mendesak agar Myanmar segera menempuh solusi damai. Kiranya persoalan mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN ini perlu juga menjadi atensi kita bersama kedepan, khususnya dengan keketuaan kita di ASEAN barangkali bisa menjadi momentum dimana Indonesia dapat mengusulkan mekanisme voting bilamana konsensus tidak tercapai. Sebagaimana yang pernah diusulkan oleh BKSAP melalui AIPA.

Rencana keanggotaan Timor Leste di ASEAN

5. Bulan lalu tepatnya pada 23 Agustus 2022, DPR RI menerima kunjungan Ketua dan Anggota Parlemen Timor Leste di Gedung Nusantara DPR RI. Salahsatu isu yang dibahas tentunya penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Timor Leste. Di samping itu, Ketua Parlemen Timor Leste juga menyampaikan harapannya untuk meningkatkan peranan yang lebih jauh di kawasan ASEAN baik dari sisi politik, kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Yang juga menjadi isu krusial adalah keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Secara parliament to parliament, tentunya DPR RI sangat mendukung masuknya Timor Leste menjadi ASEAN Member States. Sehubungan dengan itu, tentu ada beberapa pertanyaan krusial yang bisa dibahas disini dan barangkali Kemlu bisa menjelaskan: Bagaimana progres dan rencana keanggotaan Timor Leste di ASEAN dari perspektif Kementerian Luar Negeri RI? Hingga saat ini apakah isu itu sudah diterima oleh negara-negara anggota ASEAN dan jika sudah bagaimana responsnya secara umum? Kira-kira seberapa besar peluang masuknya Timor Leste sebagai anggota ASEAN?

Isu Human Security

6. Salah satu isu terkait *human security* di Kawasan kita adalah *irregular movement of displaced persons*. Terutama yang baru-baru ini sering terjadi adalah kelompok-kelompok pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai Indonesia. Walaupun Indonesia bukanlah negara pihak dalam konvensi mengenai pengungsi, tetapi kita selalu menyikapi dengan baik terhadap kasus-kasus pengungsi yang terdampar di Indonesia. Kasus-kasus semacam ini tentu berkaitan erat dengan apa yang terjadi di negara asal para pengungsi tersebut. Untuk Rohingya misalnya, sebagaimana kita ketahui, mereka mengungsi karena mencari tempat yang lebih baik dan aman bagi mereka hidup. Hal ini karena pemerintah Myanmar tidak bisa memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pada mereka. Terlebih, dengan adanya perkembangan situasi terkini di Myanmar. Bukan tidak mungkin, jika situasi di Myanmar ini semakin parah, akan terjadi gelombang

pengungsi besar-besaran ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Oleh karena itu, momen keketuaan Indonesia di ASEAN nanti dapat menjadi momentum yang baik agar tercipta kerja sama antara negara-negara ASEAN untuk meminimalisir *irregular movement of displaced persons* di Kawasan.

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Identitas ASEAN

7. Identitas sosial-budaya ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda dengan identitas Eropa yang memiliki identitas relatif homogen. ASEAN terdiri dari 10 negara dengan karakter sosial budaya yang sangat heterogen. Karena itu, membentuk suatu identitas ASEAN merupakan socio-cultural project jangka panjang. Kita memiliki ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 (ASCC) yang memiliki cakupan komprehensif mulai dari isu hak asasi manusia hingga ketahanan sosial. Namun demikian, perlu diakui bahwa negara-negara ASEAN nampaknya masih berkuat dengan tantangan domestik di negara masing-masing. Pada saat yang sama, negara-negara ASEAN juga dihadapkan pada persaingan geopolitik kekuatan politik dan ekonomi dunia seperti Amerika Serikat dan China. Pada tataran konseptual kita memiliki konsep ASEAN Way dan ASEAN Centrality. Ini tentu identitas ASEAN perlu diperkuat. Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA perlu menyorot pula aspek penguatan identitas ASEAN.

8. Masih ada kaitannya dengan keberagaman ASEAN. Bahwa ASEAN sebenarnya tidak hanya beragam dari sisi budaya saja, tetapi juga dari sistem politik yang berlaku di negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, ada negara demokrasi seperti Indonesia dan Filipina. Di sisi lain ada negara monarki absolut seperti Brunei Darussalam. Ada negara sistem satu partai seperti Vietnam dan Laos, tetapi ada juga negara monarki konstitusional seperti Thailand dan Kamboja. Keberagaman semacam ini terkadang membuat komunikasi di AIPA menjadi lebih sulit untuk mencapai

konsensus terutama terkait isu-isu yang sifatnya mendesak tetapi juga sensitif seperti isu Myanmar. Sehingga ASEAN ataupun AIPA terkesan lambat dalam mengambil keputusan. Kesan semacam ini secara tidak langsung juga berakibat pada persepsi masyarakat yang semakin pesimis terhadap ASEAN atau AIPA. Sehingga semakin sulit untuk mewujudkan ASEAN Identity. Bagaimana Kemlu memandang hal ini? Apakah ada strategi tertentu yang dapat dijalankan pada keketuaan Indonesia di ASEAN nanti?

Pendidikan dan Vokasi

9. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN tidak hanya dari luas wilayah tapi juga jumlah penduduk. Penduduk Indonesia mencapai sekitar 40,5% dari total penduduk 10 negara ASEAN. Usia produktif masyarakat kita mencapai 70% dari total jumlah penduduk atau sekitar 189 juta, jumlah ini masih lebih besar dari jumlah penduduk Filipina dan Vietnam. Namun demikian, penduduk produktif masyarakat Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD. Artinya, meskipun kita mendapatkan bonus demografi tapi kita juga menghadapi labor deficit yaitu kekurangan tenaga kerja terampil. Salah satu hal yang bisa dikejar adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Kita harus memperkuat kerjasama pendidikan vokasi secara regional. Kita bisa kerjasama dengan Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam yang jumlah tenaga terampilnya terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh perbandingan, pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari seluruh institusi pendidikan sedangkan di China mencapai 50%. Kerjasama ASEAN-China termasuk Indonesia-China untuk pengembangan sekolah vokasi benar-benar harus menjadi satu agenda di keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Kerjasama perubahan iklim di tingkat regional

10. Perubahan iklim telah menjadi isu prioritas DPR RI di berbagai event internasional mulai dari Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua dan kemudian di G20 Parliamentary Speakers Summit (P20). Di tingkat

ASEAN, kita juga konsen terhadap isu dampak perubahan iklim. Keketuaan Indonesia baik di ASEAN maupun AIPA perlu konsisten mengangkat tema perubahan iklim sebagai upaya mendorong kerjasama regional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aspek kolaborasi, technology transfer, dan juga aspek kerjasama finansial dalam mengatasi dampak perubahan iklim sangat penting untuk ditekankan. Dalam kesempatan ini, barangkali kita bisa mendapatkan informasi untuk tingkat ASEAN sendiri upaya-upaya kolaboratif untuk perubahan iklim seperti apa?

BIDANG EKONOMI

Ekonomi Digital

11. Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, termasuk smartphone dan koneksi internet berkecepatan tinggi (high-speed internet), sangat berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Aktivitas manusia, termasuk dalam bekerja, telah bergeser ke metode online, dan konsumen juga berbondong-bondong secara online untuk membeli produk atau barang, contohnya melalui e-commerce. Dalam hal ini, terdapat setidaknya 60 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi COVID-19, dan setidaknya terdapat 400 juta pengguna internet di ASEAN saat ini. Pendapatan digital ASEAN juga meningkat dari setidaknya 117 miliar US Dollar (USD) pada tahun 2020 menjadi 174 miliar USD pada tahun 2021 dan diperkirakan akan mencapai 363 miliar USD pada tahun 2025.

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan betapa bermanfaatnya untuk ekonomi nasional dan regional, secara langsung mendorong bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berinovasi dan mengembangkan usaha mereka, apa lagi mereka telah menjadi salah satu sektor fundamental bagi pembangunan ekonomi negara.

Pemerintah Indonesia menargetkan setidaknya 30 juta UMKM untuk masuk ke pasar atau *platform* digital pada tahun 2024, dan juga 19,5 juta

UMKM pada tahun 2022. Sektor UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang secara positif akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sejalan dengan SDG No.1 tentang Tanpa Kemiskinan dan SDG No. 10 tentang Mengurangi Ketimpangan.

Walaupun ekonomi digital mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional, ada beberapa hal yang perlu kita soroti selama keketuaan Indonesia di ASEAN nanti, seperti *digital divide* antar negara dan manusia, termasuk bagi UMKM yang mungkin tidak semuanya memiliki kapasitas dan keterampilan untuk melakukan digitalisasi secara efektif, termasuk di bidang digitalisasi baru.

Selain itu, kita juga harus menyoroti peran digital ekonomi dalam agenda hijau. Menurut World Economic Forum, teknologi digital dapat mengurangi emisi sebesar 20% pada tahun 2050 di tiga sektor dengan emisi tertinggi: energi, material, dan mobilitas. Contohnya di sektor energi, penggunaan digital dapat menghasilkan hingga 8% pengurangan gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2050, jika ada, diantara solusi lainnya, peningkatan efisiensi energi, contohnya di gedung-gedung, serta dengan mengelola energi terbarukan menggunakan artificial intelligence, yang didukung oleh cloud computing dan fasilitas jaringan tinggi seperti Five G (5G).

Diatas segalanya, perlu diingat bahwa manusia harus tetap menjadi obyek, bukan subyek dalam tindakan dan kebijakan suatu negara terkait apapun itu, termasuk dalam ekonomi digital, demi tercapainya ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antar kelompok.

Sekian masukan yang dapat saya sampaikan. Dalam hal ini, kita juga sangat terbuka dengan saran dan rekomendasi dari pihak Kementerian Luar Negeri.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Suasana pertemuan antara BKSAP dengan Kemlu RI



Foto Bersama setelah pertemuan





**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715842

Faks. : 021-5752132

Email : ksr.bksapdpr@gmail.com | opr_bksap@yahoo.com



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>